TUGAS
MAKALAH FILSAFAT PANCASILA
“KASUS PELANGGARAN HAM PEMBUNUHAN MUNIR SAID THALIB”

DOSEN PENGAJAR :

Dr. Agustinus W Dewantara, S.S., M.Hum.

Disusun Oleh :

NAMA : DESI AYU PRATAMA

PRODI : MANAJEMEN .A.

NIM : 3903019019

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN TAHUN 2019

ABSTRAK

Kasus kematian Munir hanya satu dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum menemukan titik terang. Hukum di Indonesia harusnya lebih diperkuat khususnya tentang HAM, karena dimasa sekarang hukum hanya berlaku bagi orang-orang lemah saja sedangkan orang-orang yang berkedudukan tinggi lebih mudah lepas dari jerat hukum yang seharusnya hukum tidak memandang status sosial seseorang di masyarakat tapi kenyataannya malah sebaliknya inilah yang menyebabkan para kaum bawah ditindas. Terbukti dari banyaknya kasus kemanusiaan yang tak kunjung usai dan tak kunjung menemui titik terang seperti kasus kematian Munir. Seharusnya pemerintah segera terbangun dari tidur lamanya dalam arti sadarlah bahwa hukum sebenarnya ada untuk menegakkan kebenaran bukan untuk menutupi kebenaran yang ada. Kelemahan hukum di Indonesia ini juga akan berdampak pada semakin meningkatnya kejahatan jika pemerintah tidak segera tanggap untuk mengubahnya. Kasus kematian Munir dapat menjadi pembelajaran bagi negara Indonesia untuk segera meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter, karena semua rakyat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kebenaran, hak hidup, hak keadilan, dan hak atas rasa aman. Inilah hebatnya sebuah jabatan yang ada di suatu negara, jabatan yang dimana hanya memenangkan kepentingan para kaum penguasa dan menyingkirkan sebuah kebenaran yang sebenarnya sudah jelas terpampang didepan mata. Lemahnya hukum di Indonesia sebenarnya sangat dirasakan pengaruhnya oleh pihak keluarga Munir, terlebih sang istri yang setelah ±15 tahun harus menelan pil pahit dimana kasus kematian suaminya tersebut tidak juga mendapatkan kejelasan. Ketika pihak keluarga mendengar bahwa penanganan kasus ini dihentikan hanyalah meninggalkan kekecewaan dari keluarga termasuk para kaum penegak hukum di Indonesia pun juga merasakan dampaknya, termasuk juga para aktivis yang ikut serta mengawal jalannya investigasi kasus dari awal dibuka hingga harus terpaksa dihentikan. Seharusnya mereka berani menjatuhkan tindakan tegas seperti memberikan hukuman yang pantasnya didapat para pelaku kasus kematian Munir. Sebagai negara Demokrasi rakyat juga memerlukan dukungan dari pihak penegak agar mau bersikap seadil-adilnya didepan hukum ini semua bertujuan agar negara dapat berjalan dengan aman.

Kata kunci: Kasus kematian Munir, Hukum di Indonesia, Kaum penguasa

Kasus Pelanggaran HAM Pembunuhan Munir Said Thalib

Munir Said Thalib beliau lahir di Malang, 8 Desember 1965. Beliau sempat menyelesaikan pendidikan S1nya di Universitas Brawijaya. Selama menjadi seorang mahasiswa, Munir

dikenal sebagai salah satu aktivis di kampusnya. Tetapi sekarang beliau lebih dikenal sebagai aktivis yang menangani pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 2004 Munir berencana untuk melanjutkan pendidikan S2nya di Utrecht Belanda. Akan tetapi diperjalanan menuju negara yang dituju tepatnya di bandara Schipol Amsterdam, Munir telah ditemukan meninggal dunia. Munir di duga sengaja di bunuh dengan cara di racuni dengan racun arsenikum. Karena berdasarkan pada pemeriksaan terdapat racun arsenik didalam makanan serta minuman yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Munir. Dalam pemeriksaan otopsi juga ditemukan racun yang serupa di dalam tubuh Munir. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dan dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa Munir meninggal karena sengaja dibunuh dengan cara diracuni. Munir adalah salah seorang aktivis HAM yang cukup berpengaruh di Indonesia. Para aktivis HAM sering kali terancam keselamatannya karena pemikiran mereka yang sering kali berseberangan dengan pemerintahan. Oleh karenanya tidak heran jika kasus kematian Munir terlihat cukup janggal. Besar kemungkinan kaum penguasa juga ikut campur dalam kasus ini. Beberapa pelaku yang ditetapkan sebagai pembunuh Munir telah diketahui tetapi dalam proses hukum mereka hanya diberi sanksi dan denda saja. Proses hukum yang tidak jelas dan terlalu berbelit-belit semakin membuat kasus pembunuhan Munir semakin tidak tentu arahnya. Banyak pihak yang berkepentingan memang terlihat dengan sengaja membuat kasus kematian Munir seakan tidak dapat diungkapkan. Pollycarpus Budihari Prayitno adalah salah seorang nama pelaku utama yang diduga telah dengan sengaja membunuh Munir. Karena telah cukup banyak bukti yang mengarah pada Pollycarpus yang dengan sengaja memalsukan surat ijin terbangnya padahal pada tanggal itu ia mendapat cuti. Sebelum Munir meninggal Pollycarpus sempat meminta Munir untuk pindah tempat duduk. Akan tetapi ketika Pollycarpus di tuduh sebagai pembunuh Munir ia langsung mengelak. Dalam proses penegakkan hukum yang berlaku Pollycarpus hanya dihukum karena pemalsuan surat ijin saja. Tidak ada yang tau apa sebenarnya motif Pollycarpus membunuh Munir karena tidak ada nya keterkaitan hubungan apapun antara Munir dan Pollycarpus. Sepertinya Pollycarpus hanyalah orang suruhan yang hanya di suruh untuk membunuh Munir. Banyak bukti yang terungkap dari misteri kematian Munir tetapi semua itu tidaklah cukup untuk menemukan kebenaran dari kasus kematian Munir yang sebenarnya. Bahkan Pollycarpus yang diduga telah membunuh Munir juga hanya dihukum karena pemalsuan surat tugas sedangkan dakwaan bahwa ialah yang membunuh Munir juga dihilangkan. Banyak kejanggalan dan keanehan dari kematian Munir tetapi jaksa serta hakim yang menangani kasus ini tidak dapat memberikan hukuman yang seharusnya pada orang yang sebenarnya adalah pelaku pembunuhan Munir. Indonesia telah kehilangan

satu orang yang berpengaruh dan pintar untuk menegakan kebenaran. Orang yang cenderung akan berusaha untuk disingkirkan jika kebenarannya dirasa dapat merugikan bagi pihak penguasa.

Bentuk Negara Demokrasi Menurut Plato Dan Aristoteles

Dalam hal ini sesuai dengan bentuk negara Aristoteles yang dikatakan oleh Plato, Indonesia merupakan bentuk negara yang konstitusinya tidak ideal karena menganut paham Demokrasi. Demokrasi itu sendiri dikatakan oleh Plato tidak ideal karena sistemnya yang memberikan kebebasan. Kebebasan yang dikatakan ini adalah tidak adanya hukum, rakyat yang memerintah dan mementingkan kepentingan serta keperluan diri sendiri. Yang menyebabkan semua orang bebas berbuat semaunya tanpa rasa takut jika kelak dituntut oleh hukum. Demokrasi semakin lemah karena tidak dipimpin oleh seorang yang bijaksana, sehingga menyebabkan negara menjadi kacau. Seharusnya yang terjadi disini adalah negara Demokrasi harusnya mementingkan HAM yang seharusnya bisa memberikan hukum keadilan yang baik untuk kasus kematian Munir, karena hal ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi seperti halnya dalam hal ini pemerintah juga ikut andil dalam menangani kasus ini, sebab mereka menganggap Munir memiliki bukti penting tentang kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir yang telah diketahui pun ditangkap.

Karena dalam kasus itu disebutkan bahwa pelaku memang sengaja membunuh aktivis Munir. Tetapi tidak adanya orientasi hukum yang jelas menyebabkan rakyat menjadi anarkis, banyak yang menuntut kejelasan dari kematian aktivis Munir yang sebenarnya. Akan tetapi seperti halnya negara dengan sengaja menutup kasus tersebut tanpa kejelasan yang pasti. Karena kelemahan hukum di Indonesia menyebabkan kasus tersebut menjadi semakin tidak jelas dan lama kelamaan dilupakan. Karena kepentingan dari perseorangan yang memiliki jabatan lebih dalam negara menyebabkan kasus ini diperlambat dan dipersulit kejelasannya. Karena kepentingan perseorangan tersebutlah yang membuat hukum di Indonesia semakin lemah.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan oleh mayoritas yang menyebabkan kaum minoritas akan kalah. Dalam hal ini juga dapat ditarik kesimpulan karena Munir adalah salah satu aktivis HAM yang berpengaruh dalam penentangan orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto yang menyebabkan kasusnya menjadi lemah. Soeharto dikenal sebagai presiden kedua RI yang tegas dan dapat memimpin negara Indonesia paling lama yaitu ± 32 tahun lamanya. Tidak ada yang berani menentangnya karena sekali seseorang berani

menyatakan menentang maka yang terjadi akan mendapat ancaman mati. Semua pengiat HAM dalam masa rezim otoriter Soeharto dan tentara tentunya sadar akan resiko itu. Soeharto cenderung dalam golongan kelompok mayoritas menyebabkan kasus kematian Munir yang cenderung kedalam golongan kelompok minoritas menjadi kalah dan tidak jelas. Kelompok golongan berkuasa yang terlalu menjunjung tinggi kekuasaannya membuat mereka melupakan amanat rakyat. Mereka melupakan fakta bahwa rakyatlah yang memiliki andil penuh dalam negara Demokrasi. Munir adalah salah satu dari sekian banyaknya rakyat Indonesia yang berusaha memperjuangkan hak asasi manusia di negaranya. Presiden Soeharto yang bertindak semena-mena membuat Munir memiliki tekad kuat untuk memperjuangkan HAM di Indonesia. Tetapi hal itu semata-mata tidaklah membuat para penguasa terkesan justru yang terjadi adalah sebaliknya Munir mendapatkan banyak pertentangan dari orang atas yang tidak menyukai perjuangan HAM yang dilakukan olehnya, sehingga hal ini lah yang sebenarnya memicu para penguasa banyak yang ingin mencelakakannya bahkan sampai berakibat kematian. Banyaknya motif terselubung yang membuat Munir memang sengaja dibunuh. Diantarannya adalah Munir dianggap memiliki data-data penting negara tentang pelanggaran HAM dan juga pembunuhan Munir dikaitkan dengan pembantaian terorisme pada tahun 2004 menjadi agen nasional.

Pembebasan pidana para tersangka membuat kasus ini kembali gelap dan tidak ada arah yang pasti. Padahal banyak bukti dan saksi yang telah ditunjukkan tetapi sepertinya hal itu tidak dilihat sebagai masalah yang serius oleh Mahkamah Agung. Pollycarpus merupakan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Munir pun dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak adanya bukti kuat yang dapat menyatakan jika ialah yang telah dengan sengaja membunuh Munir. Hanya kasus pemalsuan surat tugasnya lah yang membuat Pollycarpus mendapat hukuman pidana penjara. Ketidakadilan hukum dan ketidakseriusan pihak pemerintah dalam menangani hal ini yang menimbulkan kasus ini semakin suram. Jika ada ketegasan hukum maka kasus Munir mungkin akan segera terungkap. Seharusnya hukum dikedepankan agar dapat mencegah penyelewengan para golongan atas yang paling berkuasa. Negara dibangun untuk bersama akan tetapi banyak masyarakat yang tertindas oleh kalangan atas karena hukum yang tidak bisa berpihak pada kaum kalangan bawah.

Asal –Usul Negara Menurut Plato

Jika dilihat dari asal-usul negara HAM dapat digolongkan kedalam Natural (Natural Manusia) karena HAM adalah natural right atau hak-hak kodrati manusia. Negara Indonesia

memang terbentuk dari sebuah kesepakatan akan tetapi juga terdapat unsur Natural didalamnya karena tidak mungkin jika ada negara jika tidak ada manusia. Berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir dapat digolongkan Natural Manusia. Seharusnya pemerintah memperjuangkan juga masalah kematian Munir agar cepat terselesaikan dan para pelaku yang memiliki kemungkinan telah membunuh sang aktivis meninggal segera ditemukan. Menurut Plato Natural Manusia adalah jiwanya suatu negara yang memiliki tiga bagian yaitu intelektualitasnya, semangatnya dan hasrat atau nafsunya. Ketiganya harus harmonis jika ingin semuanya adil. Keadilan adalah harmoni antara ketiga bagian yang memerintah, yang menjamin keamanan, dan yang produktif. Seharusnya pemerintah bisa menjamin keamanan bagi semua manusia didalam negaranya. Yang dapat memerintah negara harus memiliki kebijaksanaan, mereka harus bisa bijaksana dalam memerintah tidak boleh hanya mementingkan kepentingan satu golongan saja. Kebijakan untuk segera menyelesaikan kasus Munir pun dapat menunjukan kepada rakyat bahwa hukum di Indonesia bisa ditegakkan hal inilah yang mungkin harus segera pemerintah lakukan demi mendapatkan kepercayaan rakyat bahwa masih adanya keadilan disuatu negara. Bukan hanya sesumbar janji yang sering mereka lakukan ketika masih mencaji calon wakil rakyat.

Legitimasi Moral Pemerintahan Suatu Negara

Dalam masa pemerintahan Soeharto yang merupakan presiden kedua RI beliau memang memenangkan pemilu dan secara politik memiliki hak untuk dapat memerintah akan tetapi secara moral rakyat tidak mendukungnya. Tindakan-tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Soeharto membuat rakyat merasa bahwa Soeharto pantas mundur dari jabatannya. Dalam masa pemerintahan Soeharto sebagai presiden ia seharusnya mampu memberikan jaminan perlindungan keamanan dan kesejahteraan rakyat akan tetapi kenyataannya malah hal itulah yang seakan sulit didapatkan bahkan seakan lenyap. Rakyat yang sekiranya menentang pemerintahannya akan terancam dihabisi. Termasuk halnya para aktivis HAM yang salah satunya adalah Munir. Munir yang kala itu mengetahui banyak tindakan-tindakan semena-mena yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto mencoba menegakkan keadilan HAM bagi rakyat Indonesia akan tetapi dia malah dibunuh dan dianggap sebagai orang yang akan membahayakan negara. Moral yang dimiliki seorang pemimpin sangatlah penting demi kesejahteraan rakyatnya, pemimpin yang tak bermoral cenderung akan merugikan rakyat. Rakyat yang dianggap benar akan selalu salah dimatanya dan selalu menjadi pihak yang dirugikan bahkan terus menerus ditindas.

Teori Konflik Menurut Marx

Menurut teori konflik Marx “Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang penyediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.” Dari sini dapat mengambil teori konflik ini karena dalam kasus kematian Munir merupakan konflik antara Munir dan para aktivis HAM dengan para kalangan atas atau penguasa. Para pengiat HAM banyak yang tidak sepaham dengan tindakan pemerintah. Bermaksud untuk mendapatkan keadilan untuk masyarakat tetapi tindakan seperti itulah yang dianggap melawan dan patut untuk disingkirkan keberadaannya. Konflik Munir pun sampai sekarang tidak pernah ada penyelesaian bahkan sepertinya para pemimpin dengan sengaja tidak ingin menangani kembali kasus ini. Banyak teka-teki dalam hal ini mereka para kalangan kaum atas yang tidak ingin kekuasaannya hancur terlibat berusaha keras untuk menutupi kebenaran yang ada pada kasus kematian Munir yang sebenarnya. Para golongan penguasa merasa perlu mempertahankan kekuasaannya walaupun harus menghancurkan mereka yang sekiranya mengganggu. Termasuk Munir yang mereka rasa termasuk orang yang mungkin mengancam kekuasaan mereka pun juga menjadi korbannya. Jika memang kematian Munir hanyalah kasus pembunuhan biasa seharusnya masalah itu sudah terselesaikan atau seharusnya pemerintah serius dalam menanganinya sejak lama mungkin kasus itu juga sudah terselesaikan. Mungkin para kaum atas berpendapat bahwa Munir memang sudah seharusnya disingkirkan agar mereka tetap berkuasa tanpa ada orang yang mengancam kekuasaan mereka tersebut. Seharusnya para penguasa sadar bahwa negara Indonesia sebenarnya adalah negara pengurus. Mereka seharusnya mengurus rakyatnya dengan baik bukan hanya memiliki niat untuk tetap mempertahankan kekuasaannya saja dan merugikan rakyat demi kepentingan mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1/Januari).
- DEWANTARA, A. W. (2016). *GOTONG-ROYONG MENURUT SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI MAX SCHELER, DAN SUMBANGANNYA BAGI NASIONALISME INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Dewantara, A. W. (2017). Kerasulan Awam Di Bidang Politik (Sosial-Kemasyarakatan), Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 18(9), 3-15.

Dewantara, A. W. (2013). Merefleksikan Hubungan antara Etika Aristotelian dan Bisnis dengan Studi Kasus Lumpur Lapindo. *Arete*, 2(1), 23-40.

Dewantara, A. W. (2015). Filosofi Pendidikan yang Integral dan Humanis dalam Perspektif Mangunwijaya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 13(7), 3-9.

Dewantara, A. W. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan. *Madiun: STKIP Widya Yuwana*.